

masyarakat. Sebanyak empat puluh persen (40%) yang memiliki kelompok kerja tetapi tidak mempunyai tupoksi secara tertulis. Rapat rutin bulanan yang khusus membahas Kelas Ibu Hamil jarang dilaksanakan.

1. Fungsi Penggerakan

Delapan puluh persen (80%) menyatakan bidan desa tidak pernah memberikan arahan dan motivasi kepada kader karena kurang aktif yang seharusnya kader dan tokoh masyarakat terlibat secara aktif dalam mengajak ibu hamil untuk datang ke Kelas Ibu Hamil. Enam puluh persen (60%) bidan desa menyatakan tokoh masyarakat belum terlibat penuh dalam pelaksanaan Kelas Ibu Hamil yang seharusnya terlibat dalam mensosialisasikan Kelas Ibu Hamil kepada masyarakat.

2. Fungsi pengawasan

Lima puluh persen (50%) menyatakan tidak langsung memberikan nilai pre dan post tes peserta pada lembar evaluasi setelah pelaksanaan Kelas Ibu Hamil. Tujuh puluh persen (70%) menyatakan setiap selesai melaksanakan kegiatan Kelas Ibu Hamil tidak langsung melakukan pencatatan hasil pelaksanaan pada lembar pelaporan pelaksanaan Kelas Ibu Hamil yang tersedia.

Hasil pengamatan dan studi pendahuluan oleh peneliti diasumsikan bahwa bidan desa belum melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik sehingga pelaksanaan Program Kelas Ibu Hamil cenderung asal dilaksanakan. Pelaksanaan Program Kelas Ibu Hamil yang kurang baik diasumsikan akan berpengaruh terhadap kunjungan pemeriksaan ibu hamil kepada bidan desa, sehingga mempengaruhi hasil cakupan K4.

Kabupaten Jombang telah melaksanakan sosialisasi Program Kelas Ibu Hamil sejak tahun 2009, diharapkan akan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan karena karakteristik masyarakat Jombang yang percaya kepada bidan desa sebagai tenaga kesehatan yang baik dan profesional. Karakteristik masyarakat ini mendukung

bahwa ibu hamil yang mengikuti Kelas Ibu Hamil akan melakukan pemeriksaan kehamilannya kepada bidan desa yang bertugas di tempat tinggal ibu hamil.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh fungsi manajemen Program Kelas Ibu Hamil yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, Penggerakan dan pengawasan oleh bidan desa terhadap cakupan K4 di Kabupaten Jombang.

B. Perumusan masalah

Cakupan K4 di kabupaten Jombang belum mencapai target SPM yang ditetapkan yaitu 95%. Cakupan K4 yang masih rendah merupakan salah satu indikator bahwa pelayanan kesehatan ibu hamil belum maksimal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Jombang untuk meningkatkan angka cakupan K4 adalah dengan pelaksanaan Program Kelas Ibu Hamil. Kebijakan Program Kelas Ibu Hamil telah disosialisasikan selama 1 tahun dan sudah dijalankan selama 2 semester di fasilitas kesehatan. Semua puskesmas di wilayah Kabupaten Jombang telah melaksanakan Kelas Ibu Hamil tetapi hasil cakupan K4 (83%) masih kurang dari target yang telah